



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DAN**



**HSINCHU ISLAMIC ASSOCIATION (HIA)**

**TENTANG**

**KERJASAMA PENGEMBANGAN PROGRAM PENDIDIKAN, KOLABORASI  
PENELITIAN DAN PENGABIDAN KEPADA MASYARAKAT DAN  
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR : 20.7.1/UN32.7/KS/2025

NOMOR : 051/IA/HIA/VII/2025

Pada hari ini, **Minggu** tanggal **Dua Puluh**, bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (20-07-2025)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ari Sapto, M.Hum, Dekan Fakultas Ilmu Sosial**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Yi Yu Chen, Ketua Umum Hsinchu Islamic Association (HIA)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Hsinchu Islamic Association (HIA), berkedudukan di No. 74, Zhulien Street, East District, Hsinchu City, Taiwan R.O.C 300, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu organisasi yang menaungi aktivitas umat Islam di kota Hsinchu, Taiwan.

bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama (MoU) antara Universitas Negeri Malang dengan Hsinchu Islamic Association (HIA), dengan Nomor : ..... dan Nomor : ..... tentang Kerjasama Pengembangan Program Pendidikan, Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

-1-

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Kerjasama Pengembangan Program Pendidikan, Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia serta kegiatan – kegiatan lainnya (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan Kerjasama Pengembangan Program Pendidikan, Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, merupakan inisiatif atau program mencakup berbagai kegiatan seperti pelatihan, pendidikan, pengembangan keterampilan, dan inisiatif lain yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan individu.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup Kerjasama Pengembangan Program Pendidikan, Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melibatkan Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Prodi S1 Pendidikan Geografi, Prodi S1 Geografi, Prodi S1 Pendidikan Sejarah, Prodi S1 Sejarah, Prodi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Prodi S1 Pendidikan Sosiologi, Prodi S1 Ilmu Komunikasi, Prodi S1 Pariwisata, Prodi S1 Hukum, S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Prodi S2 Pendidikan Geografi, Prodi S3 Pendidikan Geografi, dan Prodi S2 Pendidikan Sejarah dengan kordinator penanggung jawab Syamsul Bachri, S.Si., M.Sc, Ph.D (syamsul.bachri.fis @um.ac.id).

## **PASAL 3 TUJUAN**

**Perjanjian** ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban mensukseskan kegiatan dengan mengoptimalkan penggunaan secara bersama sumber daya yang dimiliki masing-masing **PIHAK**, dan dapat dipertanggung-jawabkan sesuai kemampuan masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban saling membantu dalam rangka melakukan monitoring (pengawasan) dan evaluasi sesuai dengan peranan masing-masing dalam kegiatan kerja sama.
- (3) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
  - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan dukungan operasional kegiatan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

-2-

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



- b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** menyiapkan/menugaskan tenaga ahli/staf dosen yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan kerja sama ini.
- (4) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan sumber daya manusia yang tidak bermasalah secara akademik dan non akademik dari **PIHAK PERTAMA**.
  - b. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan tenaga ahli/staf dosen dari **PIHAK PERTAMA** dengan kualifikasi yang diperlukan dalam menunjang kegiatan.
  - c. **PIHAK KEDUA** berhak menentukan dan menempatkan mahasiswa (jika terlibat) sesuai dengan keahliannya sesuai dengan nama yang telah direkomendasikan **PIHAK PERTAMA**.
  - d. Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah melakukan komunikasi tentang rencana kegiatan, mendistribusikan tugas atau peranan **PARA PIHAK** dalam kegiatan, serta ikut melakukan rapat atau pertemuan atau kordinasi jika diperlukan.

PARA **PIHAK** menyepakati bahwa untuk kegiatan sebagaimana disebut pada pasal 2 ayat (2), hak dan kewajiban yang mengatur peranan **PARA PIHAK** akan dibicarakan sesuai kesepakatan

#### **PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah durasi 5 tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 6 BIAYA KEGIATAN**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama

#### **PASAL 7 PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan perjanjian kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan turunan program kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** dapat menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

### **PASAL 8 KORESPONDENSI**

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA** : **Koordinator Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang**

Nama : Alfyananda Kurnia Putra, S.Pd., M.Pd

Alamat : UM, Jl. Semarang No 5 Kota Malang

Telepon : 085 755 900 028

Email : alfyananda.fis@um.ac.id

**PIHAK KEDUA** : **Koordinator Kerjasama Hsinchu Islamic Association (HIA)**

Nama : Yi Yu Chen

Alamat : No. 74, Zhulien Street, East District, Hsinchu City, Taiwan R.O.C 300

Telepon : 0965605252

Email : mushola.hsinchu@gmail.com

### **PASAL 9 FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima

pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

#### **PASAL 10 PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

#### **PASAL 11 KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

**PIHAK KESATU**  
Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Malang  
  
**Dr. Ari Sapto, M.Hum**  
Dekan

**PIHAK KEDUA**  
Hsinchu Islamic Association

  
**Yi Yu Chen**  
Ketua Umum

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua





**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DAN**



**HSINCHU ISLAMIC ASSOCIATION (HIA)**

**TENTANG**

**KERJASAMA PENGEMBANGAN PROGRAM PENDIDIKAN, KOLABORASI  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN  
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR : 20.7.1/UN32.7/KS/2025

NOMOR : 051/IA/HIA/VII/2025

Pada hari ini, **Minggu** tanggal **Dua Puluh**, bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (20-07-2025)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ari Sapto, M.Hum, Dekan Fakultas Ilmu Sosial**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Yi Yu Chen, Ketua Umum Hsinchu Islamic Association (HIA)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Hsinchu Islamic Association (HIA), berkedudukan di No. 74, Zhulien Street, East District, Hsinchu City, Taiwan R.O.C 300, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu organisasi yang menaungi aktivitas umat Islam di kota Hsinchu, Taiwan.

bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama (MoU) antara Universitas Negeri Malang dengan Hsinchu Islamic Association (HIA), dengan Nomor : ..... dan Nomor : ..... tentang Kerjasama Pengembangan Program Pendidikan, Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

-1-

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Kerjasama Pengembangan Program Pendidikan, Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia serta kegiatan – kegiatan lainnya (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan Kerjasama Pengembangan Program Pendidikan, Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, merupakan inisiatif atau program mencakup berbagai kegiatan seperti pelatihan, pendidikan, pengembangan keterampilan, dan inisiatif lain yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan individu.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup Kerjasama Pengembangan Program Pendidikan, Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melibatkan Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Prodi S1 Pendidikan Geografi, Prodi S1 Geografi, Prodi S1 Pendidikan Sejarah, Prodi S1 Sejarah, Prodi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Prodi S1 Pendidikan Sosiologi, Prodi S1 Ilmu Komunikasi, Prodi S1 Pariwisata, Prodi S1 Hukum, S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Prodi S2 Pendidikan Geografi, Prodi S3 Pendidikan Geografi, dan Prodi S2 Pendidikan Sejarah dengan kordinator penanggung jawab Syamsul Bachri, S.Si., M.Sc, Ph.D (syamsul.bachri.fis @um.ac.id).

## **PASAL 3 TUJUAN**

**Perjanjian** ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban mensukseskan kegiatan dengan mengoptimalkan penggunaan secara bersama sumber daya yang dimiliki masing-masing **PIHAK**, dan dapat dipertanggung-jawabkan sesuai kemampuan masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban saling membantu dalam rangka melakukan monitoring (pengawasan) dan evaluasi sesuai dengan peranan masing-masing dalam kegiatan kerja sama.
- (3) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
  - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan dukungan operasional kegiatan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

-2-

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua



- b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** menyiapkan/menugaskan tenaga ahli/staf dosen yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan kerja sama ini.
- (4) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan sumber daya manusia yang tidak bermasalah secara akademik dan non akademik dari **PIHAK PERTAMA**.
  - b. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan tenaga ahli/staf dosen dari **PIHAK PERTAMA** dengan kualifikasi yang diperlukan dalam menunjang kegiatan.
  - c. **PIHAK KEDUA** berhak menentukan dan menempatkan mahasiswa (jika terlibat) sesuai dengan keahliannya sesuai dengan nama yang telah direkomendasikan **PIHAK PERTAMA**.
  - d. Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah melakukan komunikasi tentang rencana kegiatan, mendistribusikan tugas atau peranan **PARA PIHAK** dalam kegiatan, serta ikut melakukan rapat atau pertemuan atau kordinasi jika diperlukan.

**PARA PIHAK** menyepakati bahwa untuk kegiatan sebagaimana disebut pada pasal 2 ayat (2), hak dan kewajiban yang mengatur peranan **PARA PIHAK** akan dibicarakan sesuai kesepakatan

#### **PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah durasi 5 tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 6 BIAYA KEGIATAN**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama

#### **PASAL 7 PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan perjanjian kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan turunan program kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** dapat menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;



- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

### **PASAL 8 KORESPONDENSI**

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA** : **Koordinator Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang**

Nama : Alfyananda Kurnia Putra, S.Pd., M.Pd

Alamat : UM, Jl. Semarang No 5 Kota Malang

Telepon : 085 755 900 028

Email : alfyananda.fis@um.ac.id

**PIHAK KEDUA** : **Koordinator Kerjasama Hsinchu Islamic Association (HIA)**

Nama : Yi Yu Chen

Alamat : No. 74, Zhulien Street, East District,  
Hsinchu City, Taiwan R.O.C 300

Telepon : 0965605252

Email : mushola.hsinchu@gmail.com

### **PASAL 9 FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima



pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

#### **PASAL 10 PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

#### **PASAL 11 KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

#### **PIHAK KESATU**

Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Malang



**Dr. Ari Sapto, M.Hum**  
Dekan

#### **PIHAK KEDUA**

Hsinchu Islamic Association



**Yi Yu Chen**  
Ketua Umum

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



**COOPERATION AGREEMENT  
BETWEEN  
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES  
STATE UNIVERSITY OF MALANG**



**AND  
HSINCHU ISLAMIC ASSOCIATION (HIA)**

**ON  
THE COOPERATION FOR THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL  
PROGRAMS, RESEARCH COLLABORATION, COMMUNITY SERVICE,  
AND HUMAN RESOURCE QUALITY IMPROVEMENT**

NO : 20.7.1/UN32.7/KS/2025

NO : 051/IA/HIA/VII/2025

On this day, Sunday, the twentieth of July, two thousand and twenty-five (20-07-2025), the undersigned:

1. **Dr. Ari Sapto, M.Hum**, Dean of the Faculty of Social Sciences, hereby acting for and on behalf of the State University of Malang, located at Jalan Semarang No. 5, Malang, hereinafter referred to as the **FIRST PARTY**;
2. **Yi Yu Chen**, Chairperson of the Hsinchu Islamic Association (HIA), hereby acting for and on behalf of HIA, located at No. 74, Zhulien Street, East District, Hsinchu City, Taiwan R.O.C. 300, hereinafter referred to as the **SECOND PARTY**.

The **FIRST PARTY** and the **SECOND PARTY** shall hereinafter be collectively referred to as the **PARTIES**, and individually as a **PARTY**.

The **PARTIES** hereby declare the following:

- a. The **FIRST PARTY** is a public university under the Government of the Republic of Indonesia, based on Presidential Decree No. 93 of 1999 dated August 4, 1999, engaged in higher education, research, and community service, and is responsible to the Rector of State University of Malang.
- b. The **SECOND PARTY** is an organization managing the activities of the Muslim community in Hsinchu City, Taiwan.

1

Initials of the First Signatory  
Initials of the Second Signatory

A
Y

Each **PARTY** is capable of providing institutional support under this Cooperation Agreement in a mutually beneficial manner, based on the Memorandum of Understanding (MoU) between the State University of Malang and Hsinchu Islamic Association (HIA), Number: ..... and Number: ..... on Cooperation in the Development of Educational Programs, Research Collaboration, Community Service, and Human Resource Development.

Based on the aforementioned considerations, the **PARTIES** hereby agree to bind themselves in a Cooperation Agreement concerning the Development of Educational Programs, Research Collaboration, Community Service, and Human Resource Quality Improvement, as well as other related activities (hereinafter referred to as the "**Agreement**"), under the following terms and conditions.

### **Article 1**

#### **GENERAL PROVISIONS**

This Cooperation **Agreement** on the Development of Educational Programs, Research Collaboration, Community Service, and Human Resource Quality Improvement includes various initiatives such as training, education, skills development, and other programs aimed at enhancing individual competencies, knowledge, and skills.

### **Article 2**

#### **SCOPE**

The scope of this Agreement includes cooperation across multiple departments, Undergraduate: Civic Education, Geography Education, Geography, History Education, History, Social Science Education, Sociology Education, Communication Science, Tourism, Law. Graduate: Master's in Civic Education, Master's in Geography Education, Doctoral in Geography Education, Master's in History Education The responsible coordinator is Syamsul Bachri, S.Si., M.Sc, Ph.D ([syamsul.bachri.fis@um.ac.id](mailto:syamsul.bachri.fis@um.ac.id)).

Initials of the First Signatory  
Initials of the Second Signatory




**Article 3**  
**OBJECTIVE**

This **Agreement** aims to strengthen collaboration in the scope of the Tri Dharma of Higher Education: Education, Research, and Community Service.

**ARTICLE 4**  
**RIGHTS AND OBLIGATIONS**

1. The **PARTIES** shall be responsible for the successful implementation of activities by jointly optimizing the use of their respective resources, in accordance with their capabilities and accountability.
2. The **PARTIES** shall assist each other in conducting monitoring and evaluation based on their respective roles within the scope of the cooperation activities.
3. The rights and obligations of the **FIRST PARTY** are as follows:
  - a. The **FIRST PARTY** shall have the right to receive operational support for the activities, subject to the written approval of the **PARTIES**.
  - b. The **FIRST PARTY** shall be obliged to provide or assign qualified experts or academic staff required to carry out the cooperative activities.
4. The rights and obligations of the **SECOND PARTY** are as follows:
  - a. The **SECOND PARTY** shall have the right to obtain human resources from the **FIRST PARTY** who meet both academic and non-academic standards.
  - b. The **SECOND PARTY** shall have the right to receive expert personnel or academic staff from the **FIRST PARTY** with the necessary qualifications to support the activities.
  - c. The **SECOND PARTY** shall have the right to assign and place students (if involved) according to their expertise and as recommended by the **FIRST PARTY**.

Initials of the First Signatory  
Initials of the Second Signatory

J
EM

- d. The obligation of the **SECOND PARTY** shall be to maintain communication regarding activity plans, distribute roles or responsibilities among the **PARTIES**, and participate in meetings, discussions, or coordination sessions as necessary.

The **PARTIES** agree that for the activities referred to in Article 2 paragraph (2), the rights and obligations governing the roles of the **PARTIES** shall be discussed and determined based on mutual agreement.

#### **Article 5**

##### **TERM**

This **Agreement** shall remain valid for five (5) years and may be extended or terminated earlier based on mutual consent.

#### **Article 6**

##### **FINANCIAL RESPONSIBILITIES**

All costs arising from this cooperation shall be determined by the **PARTIES** in accordance with applicable laws and incorporated into this **Agreement**.

#### **ARTICLE 7**

##### **IMPLEMENTATION OF COOPERATION**

1. The **PARTIES** shall appoint liaison officers for coordination in the implementation of the cooperation and to provide notifications to the other **PARTY**.
2. The **FIRST PARTY** shall provide information regarding all matters related to policy in the implementation of this Agreement to the **SECOND PARTY**.
3. The **SECOND PARTY** shall propose derivative programs to the **FIRST PARTY**.
4. The **SECOND PARTY** may submit a draft Budget Plan (RAB) to the **FIRST PARTY**.

Initials of the First Signatory  
Initials of the Second Signatory




5. The **FIRST PARTY** shall verify the draft Budget Plan submitted by the **SECOND PARTY**.
6. The **PARTIES** may revise the Budget Plan based on the results of the verification.
7. The **PARTIES** shall sign the agreed-upon Budget Plan, which shall serve as the basis for invoicing and payment.
8. The **PARTIES** shall conduct periodic monitoring and evaluation of the implementation of the cooperation activities in accordance with their mutual agreement.

**ARTICLE 8**  
**CORRESPONDENCE**

In the implementation of this cooperation, the **PARTIES** shall each appoint one representative as the activity coordinator to oversee the execution of the activities, as follows:

**FIRST PARTY : Coordinator of Cooperation Faculty of Social Sciences, State University of Malang**

Name : Alfyananda Kurnia Putra, S.Pd., M.Pd  
Address : State University of Malang (UM), Jl. Semarang No. 5, Malang City  
Phone : +62 857 5590 0028  
Email : [alfyananda.fis@um.ac.id](mailto:alfyananda.fis@um.ac.id)

**SECOND PARTY : Coordinator of Cooperation Hsinchu Islamic Association (HIA)**

Name : Yi Yu Chen  
Address : No. 74, Zhulien Street, East District, Hsinchu City, Taiwan R.O.C 300  
Phone : 0965605252  
Email : [mushola.hsinchu@gmail.com](mailto:mushola.hsinchu@gmail.com)

Initials of the First Signatory  
Initials of the Second Signatory




**ARTICLE 9**  
**FORCE MAJEURE**

1. Each **PARTY** shall be released from responsibility for any delay or failure in fulfilling the obligations stipulated in this **Agreement** if such delay or failure is caused by or results from circumstances beyond the control of either **PARTY**, which are classified as force majeure.
2. Events that may be classified as force majeure include, but are not limited to, natural disasters (such as earthquakes, typhoons, floods, etc.), pandemics, robbery, theft, sabotage, war, explosions, revolutions, riots, economic or monetary crises, and government regulations that affect the implementation of this **Agreement**.
3. The **PARTY** affected by a force majeure event must notify the other **PARTY** no later than fourteen (14) days after the end of the force majeure situation
4. If within ten (10) working days from the receipt of the notification as referred to in paragraph (3) there is no response from the **PARTY** receiving the notification, the risks arising from the event shall be deemed to have been accepted by that **PARTY**.
5. The force majeure condition as referred to in this Article shall not nullify the **Agreement**, and the **PARTIES** may resume the cooperation as appropriate based on their respective readiness and circumstances

**ARTICLE 10**  
**DISPUTE RESOLUTION**

1. In the event of a dispute or difference of opinion arising between the **PARTIES** in the implementation of this **Agreement**, such matters shall be resolved through deliberation to reach a mutual consensus.
2. If consensus as referred to in paragraph (1) cannot be achieved, the **PARTIES** agree to submit the dispute to the Indonesian National Arbitration Board (BANI).

Initials of the First Signatory  
Initials of the Second Signatory



**ARTICLE 11**  
**FINAL PROVISIONS**

1. Any amendments and/or matters not adequately regulated in this Agreement shall be discussed by the **PARTIES** through deliberation and shall be documented in an addendum, which shall form an integral and inseparable part of this **Agreement**.
2. This Agreement is made in two (2) original copies, duly stamped and signed by the **PARTIES**, each of which holds the same legal force for both **PARTIES**.
3. The **PARTIES** shall deliver copies of this **Agreement** to the relevant departments within their respective institutions.

**FIRST PARTY**  
Faculty of Social Sciences  
State University of Malang



Dr. Ari Sapto, M.Hum  
Dean

**SECOND PARTY**  
Hsinchu Islamic  
Association



Yi Yu Chen  
Chairperson

Initials of the First Signatory  
Initials of the Second Signatory





**COOPERATION AGREEMENT  
BETWEEN  
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES  
STATE UNIVERSITY OF MALANG**



**AND  
HSINCHU ISLAMIC ASSOCIATION (HIA)**

**ON  
THE COOPERATION FOR THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL  
PROGRAMS, RESEARCH COLLABORATION, COMMUNITY SERVICE,  
AND HUMAN RESOURCE QUALITY IMPROVEMENT**

NO : 20.7.1/UN32.7/KS/2025

NO : 051/IA/HIA/VII/2025

On this day, Sunday, the twentieth of July, two thousand and twenty-five (20-07-2025), the undersigned:

- 1. Dr. Ari Sapto, M.Hum**, Dean of the Faculty of Social Sciences, hereby acting for and on behalf of the State University of Malang, located at Jalan Semarang No. 5, Malang, hereinafter referred to as the **FIRST PARTY**;
- 2. Yi Yu Chen**, Chairperson of the Hsinchu Islamic Association (HIA), hereby acting for and on behalf of HIA, located at No. 74, Zhulien Street, East District, Hsinchu City, Taiwan R.O.C. 300, hereinafter referred to as the **SECOND PARTY**.

The **FIRST PARTY** and the **SECOND PARTY** shall hereinafter be collectively referred to as the **PARTIES**, and individually as a **PARTY**.

The **PARTIES** hereby declare the following:

- The **FIRST PARTY** is a public university under the Government of the Republic of Indonesia, based on Presidential Decree No. 93 of 1999 dated August 4, 1999, engaged in higher education, research, and community service, and is responsible to the Rector of State University of Malang.
- The **SECOND PARTY** is an organization managing the activities of the Muslim community in Hsinchu City, Taiwan.

1

Initials of the First Signatory  
Initials of the Second Signatory



Each **PARTY** is capable of providing institutional support under this Cooperation Agreement in a mutually beneficial manner, based on the Memorandum of Understanding (MoU) between the State University of Malang and Hsinchu Islamic Association (HIA), Number: ..... and Number: ..... on Cooperation in the Development of Educational Programs, Research Collaboration, Community Service, and Human Resource Development.

Based on the aforementioned considerations, the **PARTIES** hereby agree to bind themselves in a Cooperation Agreement concerning the Development of Educational Programs, Research Collaboration, Community Service, and Human Resource Quality Improvement, as well as other related activities (hereinafter referred to as the “**Agreement**”), under the following terms and conditions.

### **Article 1**

#### **GENERAL PROVISIONS**

This Cooperation **Agreement** on the Development of Educational Programs, Research Collaboration, Community Service, and Human Resource Quality Improvement includes various initiatives such as training, education, skills development, and other programs aimed at enhancing individual competencies, knowledge, and skills.

### **Article 2**

#### **SCOPE**

The scope of this Agreement includes cooperation across multiple departments, Undergraduate: Civic Education, Geography Education, Geography, History Education, History, Social Science Education, Sociology Education, Communication Science, Tourism, Law. Graduate: Master’s in Civic Education, Master’s in Geography Education, Doctoral in Geography Education, Master’s in History Education The responsible coordinator is Syamsul Bachri, S.Si., M.Sc, Ph.D ([syamsul.bachri.fis@um.ac.id](mailto:syamsul.bachri.fis@um.ac.id)).

Initials of the First Signatory  
Initials of the Second Signatory

**Article 3**  
**OBJECTIVE**

This **Agreement** aims to strengthen collaboration in the scope of the Tri Dharma of Higher Education: Education, Research, and Community Service.

**ARTICLE 4**  
**RIGHTS AND OBLIGATIONS**

1. The **PARTIES** shall be responsible for the successful implementation of activities by jointly optimizing the use of their respective resources, in accordance with their capabilities and accountability.
2. The **PARTIES** shall assist each other in conducting monitoring and evaluation based on their respective roles within the scope of the cooperation activities.
3. The rights and obligations of the **FIRST PARTY** are as follows:
  - a. The **FIRST PARTY** shall have the right to receive operational support for the activities, subject to the written approval of the **PARTIES**.
  - b. The **FIRST PARTY** shall be obliged to provide or assign qualified experts or academic staff required to carry out the cooperative activities.
4. The rights and obligations of the **SECOND PARTY** are as follows:
  - a. The **SECOND PARTY** shall have the right to obtain human resources from the **FIRST PARTY** who meet both academic and non-academic standards.
  - b. The **SECOND PARTY** shall have the right to receive expert personnel or academic staff from the **FIRST PARTY** with the necessary qualifications to support the activities.
  - c. The **SECOND PARTY** shall have the right to assign and place students (if involved) according to their expertise and as recommended by the **FIRST PARTY**.

Initials of the First Signatory  
Initials of the Second Signatory

d
[Signature]

- d. The obligation of the **SECOND PARTY** shall be to maintain communication regarding activity plans, distribute roles or responsibilities among the **PARTIES**, and participate in meetings, discussions, or coordination sessions as necessary.

The **PARTIES** agree that for the activities referred to in Article 2 paragraph (2), the rights and obligations governing the roles of the **PARTIES** shall be discussed and determined based on mutual agreement.

#### **Article 5**

##### **TERM**

This **Agreement** shall remain valid for five (5) years and may be extended or terminated earlier based on mutual consent.

#### **Article 6**

##### **FINANCIAL RESPONSIBILITIES**

All costs arising from this cooperation shall be determined by the **PARTIES** in accordance with applicable laws and incorporated into this **Agreement**.

#### **ARTICLE 7**

##### **IMPLEMENTATION OF COOPERATION**

1. The **PARTIES** shall appoint liaison officers for coordination in the implementation of the cooperation and to provide notifications to the other **PARTY**.
2. The **FIRST PARTY** shall provide information regarding all matters related to policy in the implementation of this Agreement to the **SECOND PARTY**.
3. The **SECOND PARTY** shall propose derivative programs to the **FIRST PARTY**.
4. The **SECOND PARTY** may submit a draft Budget Plan (RAB) to the **FIRST PARTY**.

Initials of the First Signatory  
Initials of the Second Signatory

J
CM

5. The **FIRST PARTY** shall verify the draft Budget Plan submitted by the **SECOND PARTY**.
6. The **PARTIES** may revise the Budget Plan based on the results of the verification.
7. The **PARTIES** shall sign the agreed-upon Budget Plan, which shall serve as the basis for invoicing and payment.
8. The **PARTIES** shall conduct periodic monitoring and evaluation of the implementation of the cooperation activities in accordance with their mutual agreement.

## **ARTICLE 8**

### **CORRESPONDENCE**

In the implementation of this cooperation, the **PARTIES** shall each appoint one representative as the activity coordinator to oversee the execution of the activities, as follows:

**FIRST PARTY : Coordinator of Cooperation Faculty of Social Sciences,  
State University of Malang**

Name : Alfyananda Kurnia Putra, S.Pd., M.Pd  
Address : State University of Malang (UM), Jl. Semarang  
No. 5, Malang City  
Phone : +62 857 5590 0028  
Email : [alfyananda.fis@um.ac.id](mailto:alfyananda.fis@um.ac.id)

**SECOND PARTY : Coordinator of Cooperation Hsinchu Islamic  
Association (HIA)**

Name : Yi Yu Chen  
Address : No. 74, Zhulien Street, East District, Hsinchu  
City, Taiwan R.O.C 300  
Phone : 0965605252  
Email : [mushola.hsinchu@gmail.com](mailto:mushola.hsinchu@gmail.com)

Initials of the First Signatory  
Initials of the Second Signatory



**ARTICLE 9**  
**FORCE MAJEURE**

1. Each **PARTY** shall be released from responsibility for any delay or failure in fulfilling the obligations stipulated in this **Agreement** if such delay or failure is caused by or results from circumstances beyond the control of either **PARTY**, which are classified as force majeure.
2. Events that may be classified as force majeure include, but are not limited to, natural disasters (such as earthquakes, typhoons, floods, etc.), pandemics, robbery, theft, sabotage, war, explosions, revolutions, riots, economic or monetary crises, and government regulations that affect the implementation of this **Agreement**.
3. The **PARTY** affected by a force majeure event must notify the other **PARTY** no later than fourteen (14) days after the end of the force majeure situation
4. If within ten (10) working days from the receipt of the notification as referred to in paragraph (3) there is no response from the **PARTY** receiving the notification, the risks arising from the event shall be deemed to have been accepted by that **PARTY**.
5. The force majeure condition as referred to in this Article shall not nullify the **Agreement**, and the **PARTIES** may resume the cooperation as appropriate based on their respective readiness and circumstances

**ARTICLE 10**  
**DISPUTE RESOLUTION**

1. In the event of a dispute or difference of opinion arising between the **PARTIES** in the implementation of this **Agreement**, such matters shall be resolved through deliberation to reach a mutual consensus.
2. If consensus as referred to in paragraph (1) cannot be achieved, the **PARTIES** agree to submit the dispute to the Indonesian National Arbitration Board (BANI).

Initials of the First Signatory  
Initials of the Second Signatory

A square box containing handwritten initials, likely representing the first and second signatories. The initials are written in black ink and are somewhat stylized.

**ARTICLE 11**

**FINAL PROVISIONS**

1. Any amendments and/or matters not adequately regulated in this Agreement shall be discussed by the **PARTIES** through deliberation and shall be documented in an addendum, which shall form an integral and inseparable part of this **Agreement**.
2. This Agreement is made in two (2) original copies, duly stamped and signed by the **PARTIES**, each of which holds the same legal force for both **PARTIES**.
3. The **PARTIES** shall deliver copies of this **Agreement** to the relevant departments within their respective institutions.

**FIRST PARTY**  
Faculty of Social Sciences  
State University of Malang



**Dr. Ari Sapto, M.Hum**  
Dean

**SECOND PARTY**  
Hsinchu Islamic  
Association



**Yi Yu Chen**  
Chairperson

Initials of the First Signatory  
Initials of the Second Signatory

